RENCANA KERJA

TAHUN 2025



DINAS SOSIAL KABUPATEN KEDIRI

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dikehadirat Allah SWT, atas limpahan taufik dan hidayahNya kepada kita semua, sehingga penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Sosial Kabupaten Kediri Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Pembangunan bidang sosial merupakan pembangunan yang terintegrasi dengan pembangunan bidang lainnya, bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial masyarakat di Kabupaten Kediri.

Penyelenggaraan/pelaksanaan pembangunan bidang sosial adalah sebagai respon terhadap permasalahan-permasalahan sosial yang timbul/terjadi di masyarakat, seperti keterlantaran, kecacatan/disabilitas, ketunaan dan kerentanan sosial serta kejadian bencana alam maupun bencana sosial serta pelayanan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) atau Pemerlu Pelayanan Keejahteraan Sosial (PPKS).

Renja Dinas Sosial Kabupaten Kediri Tahun 2025, meliputi rencana pelaksanaan program dan kegiatan beserta pagu indikatif anggaran, disertai rencana target kinerja, lokasi, kelompok sasaran, sehingga dapat memberikan arahan, pedoman dan sekaligus sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program kegiatan dibidang sosial.

Saran dan masukan yang bersifat membangun guna kesempurnaan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Kediri terutama ditahun mendatang tetap kami harapkan, semoga hal ini dapat bermanfaat terutama bagi stakeholder/pemangku kepentingan.

Kediri, 23 Februari 2024

Plt. Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Kediri

ARIYANTO
Pembina
NIP. 19740827 198602 1 001

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN ..... I - 1

1.1. Latar Belakang ..... I - 1

1.2. Landasan Hukum Renja 2025 ..... I - 2

1.3. Maksud dan Tujuan ..... I - 7

1.4. Sistematika Penulisan Rencana Kerja ..... I - 7

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU ..... II - 1

2. 1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah ..... II - 1

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ..... II- 14

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah ..... II- 17

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ..... II- 19

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .... II- 28

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH ..... III - 1

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ..... III - 1

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah ..... III - 2

3.3. Program dan Kegiatan ..... III - 3

BAB IV PENUTUP ..... IV - 1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai Tahun Berjalan 2023 ..... II - 2

Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri ..... II – 16

Tabel 2.3. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 ..... II - 20

Tabel 2.4. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 ..... II - 46

Tabel 3.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2025 ... III- 4

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); disebutkan bahwa penyusunan dokumen perencanaan harus memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, serta pagu indikatif dan prakiraan maju. Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan dan kegiatan alternative/baru.

Indikator kinerja terdiri dari indikator kinerja program yang memuat ukuran spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif hasil yang akan dicapai dari program serta indikator kinerja kegiatan yang memuat ukuran spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif masukan, keluaran yang akan dicapai dari kegiatan. Sedangkan prakiraan maju memuat kebutuhan dana untuk tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan, guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan

Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Kediri Tahun 2025 yang selanjutnya disebut Renja Dinas Sosial Tahun 2025, adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun mendatang, yang memuat program, kegiatan, lokasi serta kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan/anggaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Kediri di Bidang Sosial.

Penyusunan Renja Dinas Sosial Kabupaten Kediri Tahun 2025 disusun untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Renja Dinas Sosial Kabupaten Kediri Tahun 2025 mempunyai arti strategis didalam mendukung penyelenggaraan/pelaksanaan pemerintahan/pembangunan tahunan di bidang sosial, sebagai berikut :

1. Renja Dinas Sosial merupakan dokumen perencanaan yang secara substansial penerjemahkan visi dan misi Kabupaten Kediri dalam bentuk program/kegiatan SKPD yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial yang ditetapkan didalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD),
2. Renja Dinas Sosial merupakan acuan Dinas Sosial didalam penyusunan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS), melalui perencanaan program/kegiatan yang akan diimplementasikan di Rencana Kerja dan Anggaran (RKA),
3. Renja Dinas Sosial merupakan salah satu instrumen untuk mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan, serta untuk mengetahui tingkat capaian kinerja tahunan yang telah dicapai sebagai wujud keberhasilan antara target dan realisasi capaian kinerja SKPD.

1.2. Landasan Hukum Renja 2025

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Kediri Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6042);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);

26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 94);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 94);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2014 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 133);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 147);

1.3. Maksud dan Tujuan

1) Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja SKPD (SKPD) Dinas Sosial Kabupaten Kediri Tahun 2025 adalah merupakan penjabaran dari seluruh program/kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan dan diwujudkan untuk jangka waktu periode 1 (satu) tahun kedepan sesuai dengan ruang lingkup tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Kediri;

2) Tujuan

Tujuan dari disusunnya Rencana Kerja SKPD Dinas Sosial Kabupaten Kediri Tahun 2025 adalah sebagai pedoman/acuan didalam pelaksanaan rencana program dan kegiatan di bidang sosial yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Kediri, yaitu :

- Menetapkan program/kegiatan pembangunan dibidang sosial oleh Dinas Sosial Kabupaten Kediri selama 1 (satu) tahun ke depan dengan mengacu RPJMD Kabupaten Kediri;
- Menetapkan target dan indikator kinerja, lokasi, sasaran/kelompok sasaran maupun pagu anggaran pendanaan kegiatan pembangunan bidang sosial;
- Menjamin konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan di bidang sosial sebagai instrumen pertanggungjawaban.

1.4. Sistematika Penulisan Rencana Kerja

Sistematika penulisan Renja SKPD Dinas Sosial Tahun 2025 disusun sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja, keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD dengan Renja Kementrian/Lembaga, serta tindak lanjut dengan proses penyusunan dengan RAPBD, landasan hukum, maksud dan tujuan Renja, dan sistematika penulisan sebagai berikut.

1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu tahun 2022 (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan tahun 2023 (tahun n-1), serta target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah, sebagai berikut :

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Memuat telaahan terhadap kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah serta program dan kegiatan, sebagai berikut :

3.1. Telaahan terhadap Kebjakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV : Penutup

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dalam bentuk pelaksanan program/kegiatan tahun lalu (tahun 2022) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2023), dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah dibidang sosial dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Program dan kegiatan didalam Renja Dinas Sosial Tahun 2025 Kabupaten Kediri, diimplementasikan pada 8 (delapan) program dan 15 (lima belas) kegiatan dan 55 (lima puluh lima) sub kegiatan.

Alokasi anggaran program/kegiatan tersebut melalui belanja langsung sebesar Rp. 21.186.751.700,- (dua puluh satu milyar seratus delapan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus satu rupiah).

Secara umum hasil capaian kinerja Tahun Anggaran 2022 dalam melaksanakan pembangunan bidang sosial terutama dalam penanganan dan pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) serta Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) pada umumnya telah memenuhi target, sasaran dan capaian kinerja yang telah ditetapkan.

Evaluasi pelaksanaan capaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan pembangunan bidang sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kediri pada tahun 2022, antara lain realisasi pelaksanaan program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dan realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Faktor-faktor penyebab dari tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan tersebut kemudian dianalisa.

Review evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Kediri sampai tahun berjalan 2023 dapat lihat pada Tabel 2.1.

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program/ kegiatan Renja PD 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Dinas Sosial									
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL									
1	1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-							
	1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-							
	1	06	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		1 Dok	1 Dok	100	2 dokumen		
	1	06	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dok	1 Dok	100	1 dokumen		

	1	06	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dok	1 Dok	100	1 dokumen		
	1	06	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan		4 Dok	4 Dok	100	3 laporan		
	1	06	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan		1 Dok	1 Dok	100	2 laporan		
	1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
	1	06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan		12 Bulan	12 Bulan	100	30 orang/ bulan		
	1	06	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		12 Bulan	12 Bulan	100	1 dokumen		
	1	06	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100	1 laporan		
	1	06	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	100			

	1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									
	1	06	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket		400 bh	400 bh	100	2 paket		
	1	06	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		1410 buah	1410 buah	100	4 paket		
	1	06	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		-	-	'-			
	1	06	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket		4 jenis	4 jenis	100	10 paket		
	1	06	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan		12 kali	12 kali	100	6 Laporan		
	1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
	1	06	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan		3 jenis	3 jenis	100	3 laporan		
	1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
	1	06	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		20 unit	20 unit	100			

	1	06	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit		3 unit	3 unit	100	10 Unit		
	1	06	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit		11 unit	11 unit	100	10 Unit		
	1	06	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit		20 unit	20 unit	100	20 Unit		
	1	06	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit		4 unit	4 unit	100	2 Unit		
2	1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	-	-							
	1	06	02	2.02		Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota									
	1	06	02	2.02	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	1 Dokumen		1 Dok	1 Dok	100	1 dokumen		
	1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota									
	1	06	02	2.03	0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	370 Orang		0	0		370 orang		

	1	06	02	2.03	0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	26 Orang		100	100	100	26 orang		
	1	06	02	2.03	0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	38 Keluarga		100	100	100	38 Keluarga		
	1	06	02	2.03	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	415 Lembaga		94	94	100	87 Lembaga		
	1	06	02	2.03	0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Sertifikat		0	0	0	-		
1	1	01.01	15			**Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil**									
1	1	01.01	15	01		Fasilitasi Pemberdayaan KAT	Jumlah peserta sosialisasi fasilitasi pemberdayaan sosial KAT	0		0	0	0	-		
1	1	01.01	15	02		Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Jumlah kegiatan peningkatan kapsitas dan pendampingan KAT	0		0	0	0	-		
3	1	06	03			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	-	-							

	1	06	03	2.01		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal									
	1	06	03	2.01	0001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Orang		0	0	0	15 Orang		
4	1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	-	-							
	1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial									
	1	06	04	2.01	0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang		220 orang	220 orang	100	240 Orang		
	1	06	04	2.01	0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang		134 orang	83 orang	62.5	50 orang		

	1	06	04	2.01	0003	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Orang		14 orang	21 orang	150	20 Orang		
	1	06	04	2.01	0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang		20 orang	40 orang	200	50 Orang		
	1	06	04	2.01	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	400 Orang		220 orang	1190 orang	541	400 Orang		
	1	06	04	2.01	0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	460 Orang		510 orang	638 orang	125	960 Orang		
	1	06	04	2.01	0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang		12 orang	32 orang	267	25 Orang		
	1	06	04	2.01	0012	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang		20 orang	22 orang	110	25 Orang		
	1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial									
	1	06	04	2.02	0002	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang		30 orang	25 orang	83	50 Orang		

	1	06	04	2.02	0003	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang		50 orang	130 orang	260	50 Orang		
	1	06	04	2.02	0004	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang		450 orang	55 orang	220	30 Orang		
	1	06	04	2.02	0006	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang		230 orang	505 orang	112	35 Orang		
	1	06	04	2.02	0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Orang		584 orang	3923 orang	672	3670 Orang		
	1	06	04	2.02	0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang		30 orang	110 orang	367	30 Orang		
	1	06	04	2.02	0013	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	70 Orang					100 Orang		

	1	06	04	2.02	0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	2 Dokumen		630 orang	793 orang	126	4 Dokumen		
5	1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	-	-							
	1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota									
	1	06	05	2.02	0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	780546 Orang		703.114 jiwa	780.456 jiwa	131	780546 Orang		
	1	06	05	2.02	0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	73389 Keluarga		70.875 kpm	68749 kpm	97	73389 Keluarga		
	1	06	05	2.02	0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	119325 Keluarga		109.053 kpm	112.325 KPM	103	119325 Keluarga		
	1	06	05	2.02	0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	86 Orang		210 kpm	210 kpm	100	86 Orang		
6	1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	-	-							
	1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota									

	1	06	06	2.01	0001	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	4500 Orang		-	-	-	4500 Orang		
	1	06	06	2.01	0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang		-	-	-	100 Orang		
	1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota									
	1	06	06	2.02	0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Kampung		2 KSB	2 KSB	100	2 kampung		
	1	06	06	2.02	0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	45 Orang		40 orang	40 orang	100	45 Orang		
7	1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	-	-							
	1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota									

	1	06	07	2.01	0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 TMP	1 TMP	100	1 dokumen		
	1	06	07	2.01	0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	513 Makam		1 TMP	1 TMP	100	513 Makam		
	1	06	07	2.01	0003	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1 Laporan		1 TMP	1 TMP	100	1 Laporan		
	X					NON URUSAN									
	X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX	-	-							
8	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-							
	X	XX	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									
	X	XX	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		750 eks	430 eks	57	12 Dokumen		

Sehubungan adanya Kepmendagri 050-5899 tahun 2021 yang diterapkan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada tahun 2021 maka terjadi perubahan nomenklatur menjadi berdasar Permendagri No 90 Tahun 2019 sehingga indikator kegiatan menjadi tdak dapat diperbandingkan untuk dianalisa. Sehingga dari tabel 2.1. dapat dilihat evaluasi hasil pelaksanaan Renja SKPD Dinas Sosial Kabupaten Kediri, secara umum pelaksanaan kegiatan-kegiatan telah mencapai atau sesuai dengan target yang telah direncanakan dan ditetapkan didalam Renja Dinas Sosial Kabupaten Kediri tahun 2022.

Untuk lebih jelasnya evaluasi kondisi target dan realisasi kinerja serta capaian kinerja pelaksanaan kegiatan-kegiatan dapat dijelaskan berikut :

1. Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu
   a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   b. Administrasi Umum Perangkat Daerah
   c. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   d. Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil
   e. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota;

2. Realisasi kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :
   a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   b. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ;
   c. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota;
   d. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :
   a. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota;
   b. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial;
   c. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial;

4. Faktor-faktor Penyebab tidak tercapai, terpenuhinya atau melebihinya target kinerja program/kegiatan.
   a. Penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan pada Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah karena adanya alokasi gaji tunjangan yang harus menyediakan adanya gaji dan tunjangan pada semua jabatan sedangkan pada akhir tahun jabatan tersebut tidak terisi, Administrasi Umum Perangkat Daerah karena adanya kenaikan biaya satuan bahan bacaan sehingga alokasi dana tidak mencukupi.
   b. Penyebab terpenuhinya target kinerja program/kegiatan disebabkan kesesuaian pelaksanaan kegiatan yang mengacu kepada DPA dan Indikator Kinerja Program (outcomes) serta Kegiatan (output).
   c. Penyebab melebihnya target kinerja program/kegiatan disebabkan effisiensi pemanfaatan alokasi anggaran sehingga dapat digunakan untuk menambah volume objek/sasaran kegiatan,

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah.
   Terpenuhinya target capaian program/kegiatan Renstra Perangkat Daerah Dinas Sosial menunjukkan capaian kinerja program/kegiatan telah dilaksanakan dan berjalan sesuai alur/mekanisme penyusunan Rencana Stategis Perangkat Daerah.

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi factor-faktor penyebab tersebut.
   Dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran program/kegiatan menyesuaikan dengan kebutuhan sasaran, volume serta lokasi dengan memperhatian indikator kinerja, volume dan sasaran yang akan ditetapkan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Secara umum Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Kediri di bidang sosial berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Norma Standar Prosedur dan Kreteria (NSPK) dan program-program nasional, program-program provinsi Jawa Timur serta Strandar Pelayanan Minimal (SPM) maupun terhadap penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Kediri dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri.

Indikator kinerja program/kegiatan dikaji dan dianalisa sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Kediri.

Untuk urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) terdiri atas 5 jenis layanan dasar, yaitu

a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti; sosial,
b. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti sosial;
c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti sosial;
d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti sosial; dan
e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota

Analisis kinerja pelayanan SKPD Dinas Sosial Kabupaten Kediri terlihat pada Tabel 2.2. sebagai berikut :

Tabel : 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial

Kabupaten Kediri

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	I K K	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2025	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	5	6	9	10	11	12	13
1.	Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	% jumlah PMKS yg diberi bantuan	0,550%	4.21%	4.63%	4.93%	8.78%	12.87%	4.63%	4.93%	
2.	Jumlah warga negara anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti										
3.	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti										
4.	Jumlah warga negara tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti										
5.	Jumlah warga negara korban bencana kabupaten yang memperoleh perlindungan sosial	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kab/kota	% jumlah PSKS yg diberdayakan	70,00%	50,48%	55,53%	58,53%	65.54%	67.54%	55.53%	58.53%	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Kediri didasarkan pada kewenangan tugas pokok dan fungsi sesuai Peraturan Bupati Kediri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Kediri; yaitu unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah dibidang sosial ".

Isu stategis di bidang sosial sesuai RPJMD Tahun 2016-2021 Kabupaten Kediri adalah " Penguatan kebijakan pelayanan bagi PMKS secara terpadu dan lintas sektoral, untuk meningkatkan pencegahan permasalahan sosial dan pemerataan akses pelayanan bagi PMKS. "

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Kediri dilaksanakan sesuai dengan RPJPD Kabupaten Kediri tahun 2005 - 2025 serta PPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2021 - 2026 melalui program dan kegiatan pembangunan dan pelayanan bidang sosial.

Atas dasar Misi 1 Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri yaitu Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Berkarakter Nasionalis-Religius dan tujuan Menurunkan angka kemiskinan dan dengan kebijakan Penanganan masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial maka:

1. Kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis

   Pelaksanaan pembangunan bidang sosial merupakan bagian integral dari pembangunan manusia seutuhnya dilaksanakan sesuai amanat konstitusi UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

   Penyelenggaraan kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial seperti :

   a. kemiskinan;
   b. ketelantaran;
   c. kecacatan;
   d. keterpencilan;
   e. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;
   f. korban bencana; dan/atau
   g. korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

2. Permasalahan dan Hambatan yang dihadapai dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

   Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Dinas Sosial, terjadi seiring dengan timbulnya permasalahan-permasalahan sosial di masyarakat yang sangat komplek dan dinamis, terutama permasalahan bagi Penyandang Maslah Kesejahteraan Sosial (PMKS) atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) serta perubahan kondisi pemasalahan sosial masyarakat.

   Hambatannya, masih tingginya populasi PPKS yang tersebar diseluruh wilayah Kab. Kediri dengan berbagai macam jenis dan kreteria perlu diimbangi dengan alokasi anggaran yang memadai.

3. Dampak terhadap Pencapaian Misi dan Misi Kepala Daerah, terhadap Capaian Program Nasional/Internasional, Seperti NSPK, SPM dan SDGs.

   Penyelenggaraan/pelaksanaan pembangunan bidang sosial yang dilaksanakan Dinas Sosial Kabupaten Kediri sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah, Visi yaitu :

   " **Terwujudnya masyarakat Kabupaten Kediri yang maju, berkarakter nasionalis-religius berdasarkan ekonomi kerakyatan yang di dukung birokrasi yang melayani** "

4. Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah.

   Tantangan pembangunan bidang sosial kedepan akan semakin berat seiring dengan timbulnya permasalahan-permasalahan sosial baru yang sangat komplek serta dimanis di masyarakat.

   Peluang dalam penyelenggaraan/pelaksanaan pembangunan bidang sosial, karena adanya aturan, regulasi, undang-undang atau konstitusi yang menjadi landasan pelaknaan pembanguanan di bidang sosial serta adanya alokasi anggaran.

5. Formulasi Isu-Isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk menintaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanankan, Antara lain :

   a) Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

b) Pelaksanaan program/kegiatan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

1. Review terhadap rancangan awal RKPD, dilakukan dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan program/kegiatan di bidang sosial diperlukan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Dinas Sosial.
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan.

   Review rancangan awal RKPD dilakukan untuk rasionalisasi penganggaran dalam pelaksanaan program/kegiatan di bidang sosial sesuai dengan perkembangan permasalahan-permasalahan sosial yang timbul/terjadi bagi Penyandang Permasalahan Kesejahteraan Sosial (PMKS) atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan cacatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

   Perbedaan dengan rancangan awal RKPD karena perubahan volume dan sasaran kegiatan yang disesuaikan dengan pelaksanaan penanganan dan pelayan bagi PMKS atau PPKS sesuai dengan kondisi permasalahan sosial yang timbul/terjadi di masyarakat sehingga akan menyesuaikan dengan kebutuhan volume dan sasaran kegiatan yang ada.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD, terlihat pada Tabel 2.3. berikut :

Tabel : 2.3

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

Kabupaten Kediri

Nama Perangkat Daerah : Dinas Sosial

No.						Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
						Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1						2	3	4	5	6	7	11	12
						Dinas Sosial				16,654,215,199	Dinas Sosial	21,192,881,700	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				16,651,667,599	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	21,190,334,100	
	1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				16,651,667,599	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	21,190,334,100	
1	1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		-	-	4,698,018,199	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5,203,020,100	

	1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		-	-	101,526,728	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	151,526,728	-
	1	06	01	2.01	00 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	55,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	55,000,000	-
	1	06	01	2.01	00 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5,000,828	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5,000,828	-
	1	06	01	2.01	00 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5,093,800	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5,093,800	-

	1	06	01	2.01	00 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	5,032,800	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	55,032,800	-
	1	06	01	2.01	00 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	31,399,300	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31,399,300	-
	1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		-	-	4,016,026,501	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,016,026,600	-
	1	06	01	2.02	00 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	3,393,085,201	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,393,085,300	-

	1	06	01	2.02	00 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	612,222,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	612,222,000	-
	1	06	01	2.02	00 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5,033,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5,033,000	-
	1	06	01	2.02	00 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	5,686,300	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5,686,300	-
	1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		-	-	220,233,500	Administrasi Umum Perangkat Daerah	625,235,302	-

	1	06	01	2.06	00 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	16,670,500	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	166,670,500	-
	1	06	01	2.06	00 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	52,981,500	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	137,981,500	-
	1	06	01	2.06	00 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	8,124,500	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	53,126,302	-
	1	06	01	2.06	00 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	13,157,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13,157,000	-

	1	06	01	2.06	00 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	129,300,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	254,300,000	-
	1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	50,397,500	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50,397,500	-
	1	06	01	2.08	00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	50,397,500	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50,397,500	-
	1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	309,833,970	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	359,833,970	-
	1	06	01	2.09	00 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	25,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25,000,000	-

	1	06	01	2.09	00 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	55,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	55,000,000	-
	1	06	01	2.09	00 05	Pemeliharaan Mebel	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	10,000,000	Pemeliharaan Mebel	10,000,000	-
	1	06	01	2.09	00 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	20,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	70,000,000.00	-
	1	06	01	2.09	00 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	199,833,970	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	199,833,970	-

2	1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		-	-	972,502,800	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	2,251,806,530	
	1	06	02	2.02		Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota		-	-	1,959,300	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1,959,300	-
	1	06	02	2.02	00 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	1 Dokumen	1,959,300	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	1,959,300	-
	1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		-	-	970,543,500	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	2,249,847,230	-
	1	06	02	2.03	00 01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	370 Orang	13,980,600	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	313,980,600	-

	1	06	02	2.03	00 02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	26 Orang	325,980,600	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	325,980,600	-
	1	06	02	2.03	00 03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	38 Keluarga	2,000,100	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	667,000,100	-
	1	06	02	2.03	00 04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	415 Lembaga	489,225,200	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	489,225,200	-

	1	06	02	2.03	00 05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Sertifikat	139,357,000	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	453,660,730	-
3	1	06	03			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN		-	-	6,130,000	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	6,130,000	
	1	06	03	2.01		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal		-	-	6,130,000	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	6,130,000	-

	1	06	03	2.01	00 01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Orang	6,130,000	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	6,130,000	-
4	1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		-	-	1,199,830,200	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	3,048,061,070	
	1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		-	-	422,635,000	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1,452,635,000	-
	1	06	04	2.01	00 01	Penyediaan Permakanan	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	16,140,000	Penyediaan Permakanan	316,140,000	-

	1	06	04	2.01	00 02	Penyediaan Sandang	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	7,776,000	Penyediaan Sandang	37,776,000	-
	1	06	04	2.01	00 03	Penyediaan Alat Bantu	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Orang	11,000,200	Penyediaan Alat Bantu	311,000,200	-
	1	06	04	2.01	00 04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	52,000,000	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	52,000,000	-
	1	06	04	2.01	00 05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	400 Orang	110,421,200	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	110,421,200	-

	1	06	04	2.01	00 10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	460 Orang	114,487,600	Pemberian Layanan Kedaruratan	114,487,600	-
	1	06	04	2.01	00 11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	35,460,000	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	235,460,000	-
	1	06	04	2.01	00 12	Pemberian Layanan Rujukan	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	75,350,000	Pemberian Layanan Rujukan	275,350,000	-
	1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		-	-	777,195,200	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	1,595,426,070	-

	1	06	04	2.02	00 02	Pemberian Layanan Kedaruratan	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	27,280,000	Pemberian Layanan Kedaruratan	227,280,000	-
	1	06	04	2.02	00 03	Penyediaan Permakanan	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	10,000,000	Penyediaan Permakanan	210,000,000	-
	1	06	04	2.02	00 04	Penyediaan Sandang	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	13,520,000	Penyediaan Sandang	213,520,000	-
	1	06	04	2.02	00 06	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	6,262,500	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	6,262,500	-

	1	06	04	2.02	00 07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Orang	522,456,700	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	522,456,700	-
	1	06	04	2.02	00 08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	20,166,000	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	238,396,870.00	-
	1	06	04	2.02	00 13	Pemberian Layanan Rujukan	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	70 Orang	144,290,000	Pemberian Layanan Rujukan	144,290,000	-

	1	06	04	2.02	00 14	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	2 Dokumen	33,220,000	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	33,220,000	-
5	1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		-	-	9,431,189,200	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	9,931,189,200	
	1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		-	-	9,431,189,200	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	9,931,189,200	-
	1	06	05	2.02	00 01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	780546 Orang	102,337,100	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	102,337,100	-
	1	06	05	2.02	00 02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	73389 Keluarga	1,447,500,000	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1,447,500,000	-

	1	06	05	2.02	00 03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	119325 Keluarga	7,849,300,800	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	7,849,300,800	-
	1	06	05	2.02	00 04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	86 Orang	32,051,300	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	532,051,300	-
6	1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA		-	-	275,000,000	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	675,000,000	
	1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		-	-	-	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	300,000,000	-
	1	06	06	2.01	00 01	Penyediaan Makanan	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	4500 Orang	-	Penyediaan Makanan	150,000,000	-

	1	06	06	2.01	00 02	Penyediaan Sandang	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	-	Penyediaan Sandang	150,000,000	-
	1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		-	-	275,000,000	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	375,000,000	-
	1	06	06	2.02	00 01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Kampung	-	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	100,000,000	-

	1	06	06	2.02	00 02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	45 Orang	275,000,000	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	275,000,000	-
7	1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		-	-	68,997,200	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	68,997,200	
	1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		-	-	68,997,200	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	68,997,200	-
	1	06	07	2.01	00 01	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1 Dokumen	-	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	-	-
	1	06	07	2.01	00 02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	513 Makam	68,997,200	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	68,997,200	-

	1	06	07	2.01	00 03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1 Laporan	-	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	-	-
	X					NON URUSAN				2,547,600	NON URUSAN	2,547,600	
	X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				2,547,600	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX	2,547,600	
8	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		-	-	2,547,600	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,547,600	
	X	XX	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		-	-	2,547,600	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2,547,600	-
	X	XX	01	2.06	00 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	2,547,600	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2,547,600	-
	J U M L A H									**16,654,215,199**		**21,186,751,700**	

2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaan usulan program/kegiatan di Dinas Sosial Kabupaten Kediri dilaksanakan melalui mekanisme koordinasi, konsultasi, penelaahan serta analisa pengajuan dari bidang-bidang dan sekretariat di Dinas Sosial Kabupaten Kediri.

Bidang-bidang memperoleh input/masukan program/kegiatan atas dasar kebutuhan prioritas program/kegiatan dan usulan dari bawah/masyarakat/stakeholder maupun koordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, serta dengan memperhatikan isu-isu penting yang berkembang; sedangkan untuk sekretariat didasarkan atas kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Kediri.

Selanjutnya usulan dari bidang-bidang dan sekretariat tersebut dikonsultasikan dan atas persetujuan pimpinan/Kepala Dinas Sosial selaku pemangku kebijakan di Dinas Sosial Kabupaten Kediri, kemudian diusulkan, diverifikasi dan diklarifikasi dengan BAPPEDA Kabupaten Kediri sebagai bahan usulan program dan kegiatan yang akan di input melalui aplikasi e-planning program dan kegiatan dan menjadi bahan didalam Musrenbang Kabupaten Kediri.

Guna memperlancar pelaksanaan tugas-tugas tersebut Dinas Sosial Kabupaten Kediri dilengkapi sebagai berikut :

1. Sekretaris

   Sekretariat mempunyai tugas membantu kepala Dinas dalam menyusun kebijakan, mengkoordinasikan bidang-bidang, membina, melaksanakan dan mengendalikan administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, ketenagaan, kerumahtanggaan dan kelembagaan.

   Untuk melaksanakan tugas dimaksud sekretaris menyelenggarakan fungsi :

   a. Penyusunan rancangan kebijakan dinas;
   b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas bidang-bidang dan UPTD;
   c. Penyusunan program dan pelaporan, pengelolaan sistem informasi, pemantauan dan evaluasi kegiatan dinas;
   d. Pelaksanaan pembinaan, pengelolaan dan pengendalian administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, ketenagaan, kerumahtanggaan, dan kelembagaan;
   e. Pengoordinasian penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan bidang sosial;

f. Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, hubungan masyarakat, dokumentasi dan perpustakaan;
g. Pelaksanaan analisis jabatan dan beban kerja;
h. Pengorganisasian penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan dinas;
i. Penyusunan profil dinas;
j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan teknis dinas.

2. Bidang Perlindungan dan Jamian Sosial

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang perlindungan dan jaminan sosial.

Selain melaksanakan tugas tersebut juga mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perlindungan sosial kepada korban bencana, seseorang, keluarga, dan masyarakat yang berada dalam keadaan tidak stabil atau rentan, dan jaminan perlindungan keluarga ;
b. Pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan umum di bidang perlindungan sosial kepada korban bencana, seseorang, keluarga, dan masyarakat yang berada dalam keadaan tidak stabil atau rentan, dan jaminan sosial keluarga;
c. Pelaksanaan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang perlindungan sosial kepada korban bencana, seseorang, keluarga, dan masyarakat yang berada dalam keadaan tidak stabil atau rentan, dan jaminan sosial keluarga;
d. Pemberian bimbingan teknis, bimbingan lanjut dan supervise di bidang perlindungan sosial kepada korban bencana, seseorang, keluarga, dan masyarakat yang berada dalam keadaan tidak stabil atau rentan, dan jaminan sosial keluarga;
e. Pengoordinasian dan konsultasi pelaksanaan tugas di bidang perlindungan sosial kepada korban bencana, seseorang, keluarga, dan masyarakat yang berada dalam keadaan tidak stabil atau rentan, dan jaminan sosial keluarga;
f. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan sosial kepada korban bencana, seseorang, keluarga, dan masyarakat yang

berada dalam keadaan tidak stabil atau rentan, dan jaminan sosial keluarga; dan

g. Pelaksanaan administrasi dan tata usaha Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.

3. Bidang Rehabilitasi Sosial

Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebjakan teknis di bidang rehabilitasi sosial.

Selain melaksanakan tugas tersebut juga mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi sosial anak, lanjut usia, penyandang tuna sosial, korban pedagangan orang, korban tindak kekerasan, pekerja migran bermasalah dan penyandang disabilitas;
b. Pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan umum di bidang rehabilitasi sosial anak, lanjut usia, penyandang tuna sosial, korban perdagangan orang, korban tindak kekerasan, pekerja migran bermasalah, dan penyandang disabilitas;
c. Pelaksanaan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang rehabilitasi sosial anak, lanjut usia, penyandang tuna sosial, korban perdagangan orang, korban tindak kekerasan, pekerja migran bermasalah, dan penyandang disabilitas;
d. Pemberian bimbingan teknis, bimbingan lanjut dan supervisi di bidang rehabilitasi sosial anak, lanjut usia, penyandang tuna sosial, korban perdagangan orang, korban tindak kekerasan, pekerja migran bermasalah, dan penyandang disabilitas;
e. Pengoordinasian dan konsultasi pelaksanaan tugas di bidang rehabilitasi sosial anak, lanjut usia, penyandang tuna sosial, korban perdagangan orang, korban tindak kekerasan, pekerja migran bermasalah, dan penyandang disabilitas;
f. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi sosial anak, lanjut usia, penyandang tuna sosial, korban perdagangan orang, korban tindak kekerasan, pekerja migran bermasalah, dan penyandang disabilitas; dan
g. Pelaksanaan administrasi dan tata usaha Bidang Rehabilitasi Sosial

4. Bidang Pemberdayaan Sosial

Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan sosial.
Dalam melaksanakan tugas Bidang Pemberdayaan Sosial menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial, dan lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya kesejahteraan sosial, pelestarian dan penanaman nilai-nilai kepahlawanan, kepirintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial serta pembinaan, perijinan, pemantauan, penyelidikan dan penyidikan terhadap penyimpangan pengumpulan/pengelolaan sumber dana sosial;
b. Pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan umum di bidang pemberdayaan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah kesejaheraan sosial, dan lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya kesejahteraan sosial, pelestarian dan penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial serta pembinaan, perijinan, pemantauan, penyelidikan dan penyidikan terhadap penyimpangan pengumpulan/pengelolaan sumber dana sosial;
c. Pelaksanaan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pemberdayaan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial, dan lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya kesejahteraan sosial, pelestarian dan penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial serta pembinaan, perijinan, pemantauan, penyelidikan dan penyidikan terhadap penyimpangan pengumpulan/ pengelolaan sumber dana sosial;

d. Pemberian bimbingan teknis, bimbingan lanjut dan supervisi di bidang pemberdayaan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial, dan lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya kesejahteraan sosial,

pelestarian dan penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial serta pembinaan, perijinan, pemantauan, penyelidikan dan penyidikan terhadap penyimpangan pengumpulan/pengelolaan sumber dana sosial;

e. Pengoordinasian dan konsultasi pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial, dan lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya kesejahteraan sosial, pelestarian dan penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial serta pembinaan, perijinan, pemantauan, penyelidikan dan penyidikan terhadap penyimpangan pengumpulan/pengelolaan sumber dana sosial;
f. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial, dan lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya kesejahteraan sosial, pelestarian dan penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial serta pembinaan, perijinan, pemantauan, penyelidikan dan penyidikan terhadap penyimpangan pengumpulan/pengelolaan sumber dana sosial; dan
g. Pelaksanaan administrasi dan tata usaha Bidang Pemberdayaan Sosial.

5. Bidang Penanganan Fakir Miskin

Bidang Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang penanganan fakir miskin.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Penanganan Fakir Miskin menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang identifikasi, pemetaan, penguatan kapasitas, pendampingan dan pemberdayaan, bantuan stimulan, penataan lingkungan sosial, dan pengelolaan data kemiskinan;
b. Pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan umum di bidang identifikasi, pemetaan, penguatan kapasitas, pendamping dan pemberdayaan, bantuan stimulan, penataan lingkungan sosial, dan pengelolaan data kemiskinan;

c. Pelaksanaan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang identifikasi, pemetaan, penguatan kapasitas, pendampingan dan pemberdayaan, bantuan stimulant, penataan lingkungan sosial, dan pengelolaan data kemiskinan;

d. Pemberian bimbingan teknis, bimbingan lanjut dan supervisi di bidang identifikasi, pemataan, penguatan kapasitas, pendampingan dan pemberdayaan, bantuan stimulan, penataan lingkungan sosial, dan pengelolaan data kemiskinan;

e. Pengoordinasian dan konsultasi pelaksanaan tugas di bidang identifikasi, pemataan, penguatan kapasitas, pendampingan dan pemberdayaan, bantuan simulan, penataan lingkungan sosial, dan pengelolaan data kemiskinan;

f. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang identifikasi, pemetaan, penguatan kapasitas, pendampingan dan pemberdayaan, bantuan stimulan, penataan lingkungan sosial, dan pengelolaan data kemiskinan; dan

g. Pelaksanaan administrasi dan tata usaha bidang penanganan fakir miskin.

Adapun rencana usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan di Dinas Sosial Kabupaten Kediri pada Tahun 2022 seperti pada

Tabel 2.4. sebagai berikut :

Tabel : 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Kediri

Nama Perangkat Daerah : Dinas Sosial

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kecamatan Kandangan, Puncu, Kepung, Banyakan, Ngadiluwih, Wates, Ngancar	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	7 lembaga	POKIR

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); dijelaskan pada bagian kesatu klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari atas urusan pemerintahan absulut, pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.

Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, yang menjadi urusan kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaiatan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar termasuk didalamnya bidang sosial.

Tugas Pokok Dinas Sosial Kabupaten Kediri sebagai unsur pelaksana urusan pemerintah daerah dibidang sosial, dalam Misi 1 ialah Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Berkarakter Nasionalis-Religius dan tujuan Menurunkan angka kemiskinan dan dengan kebijakan Penanganan masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Program-program pembangunan bidang sosial di Dinas sosial Kabupaten Kediri meliputi :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program pemberdayaan sosial
3. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
4. Program Rehabilitasi Sosial
5. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
6. Program Penanganan Bencana
7. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Program pembangunan bidang sosial tersebut merupakan upaya solusi untuk mewujudkan perbaikan atas kondisi tata kehidupan dan tata sosial yang lebih baik serta meningkatkan kesejahteraan sosial.

Nilai-nilai sosial lebih diarahkan dalam menumbuh-kembangkan nilai tanggung jawab, rasa kepedulian dan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosial kelompok-kelompok marginal seperti diantaranya kelompok masyarakat yang kurang beruntung, rentan dan kelompok masyarakat yang karena konsisi fisik dan mentalnya masih belum mampu untuk melakukan peran-peran sosialnya, serta kelompok masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Dinamika dan mobilisasi permasalahan sosial yang terjadi merupakan tantangan ke depan yang semakin berat, apabila tidak dilakukan penanganan/solusi secara tepat dan terpadu akan berakibat kesenjangan sosial yang semakin meluas, melebar dan berdampak pada melemahnya ketahanan sosial masyarakat, serta dapat mendorong terjadinya konflik sosial di masyarakat yang lebih komplek. Kondisi ini merupakan isu aktual khususnya di bidang sosial yang membutuhkan penanganan segera.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Rumusan tujuan dan sasaran Renja Dinas Sosial Kabupaten Kediri Tahun 2025 berorentasi pada isus-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Kediri serta berorentasi pada RPJMD Kabupaten Kediri, Renstra, visi, misi Pemerintah Kabupaten Kediri

Isu strategis bidang sosial sesuai RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2021 - 2026 adalah Penanganan masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial, untuk meningkatkan pencegahan permasalahan sosial dan pemerataan akses pelayanan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

Adapun tujuan dari Renja Dinas Sosial Kabupaten Kediri sebagai berikut :

a. Meningkatkan aksesibilitas pelayanan dan penanganan rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanggulangan kemiskinan serta pemberdayaan sosial bagi kelompok masyarakat rentan, kurang beruntung dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya.Upaya meningkatkan

ketahanan sosial individu, keluarga dan masyarakat dalam rangka mencegah dan mengantisipasi permasalahan sosial.

b. Meningkatkan kualitas, kuantitas dan profesionalisme dalam menangani dan pelayanan sosial sebagai modal dan landasan utama bagi pembangunan bidang sosial.
c. Meningkatkan respon penanganan serta pelayanan sosial bagi korban bencana alam dan bencana sosial melalui peran serta aktif masyarakat, dunia usaha, organisasi sosial dalam penyelenggaraan pembangunan dibidang sosial.

Adapun sasarannya :

a. Meningkatkan bimbingan sosial, pembinaan, pendampingan, pelatihan ketrampilan bagi anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk anak nakal, anak jalanan, penyandang cacat/disabilitas, fakir miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial lainnya.
b. Meningkatkan pemberdayaan sosial kelompok masyarakat kurang beruntung, fakir miskin, penyandang cacat/disabilitas dan masyarakat yang tinggal dikawasan rawan bencana.
c. Meningkatkan kualitas, kuantitas dan profesionalisme Pekerja Sosial Masyarakat, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Karang Taruna, Tagana serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) lainnya.
d. Meningkatkan kegiatan dalam rangka mewujudkan rasa keperintisan, kepahlawanan, kesetiakawanan sosial yang mengarah pada kepedulian sosial yang melibatkan lintas sektoral dan stakeholder.

3.3. Program dan Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan di Dinas Sosial Kabupaten Kediri antara lain : Pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, pencapaian SDGs, pengentasan kemiskinan, pencapaian pelaksanaan Norma Standar Prosedur dan Kreteria (NSPK) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Pada tahun 2025 Dinas Sosial melaksanakan 7 (tujuh) program di implementasikan dalam 14 (empat belas kegiatan dan 53 (lima puluh tiga) sub kegiatan yang tersebar di sekretariat dan bidang-bidang.

Program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2023 sebagaimana Tabel 3.1. berikut :

TABEL 3.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2025
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025
KABUPATEN KEDIRI

Nama SKPD : Dinas Sosial Kabupaten Kediri

NO	PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				SUMBER DANA	CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
		INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dinas Sosial				**16,654,215,199**				**19,985,058,239**
1....	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	-	-	-	**16,651,667,599**				**19,982,001,119**
1.06...	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**	-	-	-	**16,651,667,599**				**19,982,001,119**
11.06.01..	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-		-	**4,698,018,199**				**5,637,621,839**
1.06.01.2.01.	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	-		1 Dok	**101,526,728**	Dana Alokasi Umum (D A U)		1 Dok	**121,832,074**
1.06.01.2.01.0001	**Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dok	**55,000,000**	Dana Alokasi Umum (D A U)		1 Dok	**66,000,000**

1.06.01.2.01.0002	**Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD**	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dok	**5,000,828**	Dana Alokasi Umum (D A U)		1 Dok	**6,000,994**
1.06.01.2.01.0003	**Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD**	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Dok	**5,093,800**	Dana Alokasi Umum (D A U)		4 Dok	**6,112,560**
1.06.01.2.01.0006	**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dok	**5,032,800**	Dana Alokasi Umum (D A U)		1 Dok	**6,039,360**
1.06.01.2.01.0007	**Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	**31,399,300**				**37,679,160**
1.06.01.2.02.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-		12 Bulan	**4,016,026,501**	Dana Alokasi Umum (D A U)		12 Bulan	**4,819,231,801**

1.06.01.2.02.0001	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Bulan	**3,393,085,201**	Dana Alokasi Umum (D A U)		12 Bulan	**4,071,702,241**
1.06.01.2.02.0002	**Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN**	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dok	**612,222,000**	Dana Alokasi Umum (D A U)		1 Dok	**734,666,400**
1.06.01.2.02.0005	**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD**	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dok	**5,033,000**	Dana Alokasi Umum (D A U)		1 Dok	**6,039,600**
1.06.01.2.02.0007	**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD**	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	**5,686,300**				**6,823,560**
1.06.01.2.06.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-		12 Bulan	**220,233,500**	Dana Alokasi Umum (D A U)		12 Bulan	**264,280,200**

1.06.01.2.06.0001	**Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Bulan	**16,670,500**	Dana Alokasi Umum (D A U)		12 Bulan	**20,004,600**
1.06.01.2.06.0002	**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Bulan	**52,981,500**	Dana Alokasi Umum (D A U)		12 Bulan	**63,577,800**
1.06.01.2.06.0003	**Penyediaan Peralatan Rumah Tangga**	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Bulan	**8,124,500**	Dana Alokasi Umum (D A U)		12 Bulan	**9,749,400**
1.06.01.2.06.0005	**Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Bulan	**13,157,000**	Dana Alokasi Umum (D A U)		12 Bulan	**15,788,400**
1.06.01.2.06.0009	**Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	**129,300,000**				**155,160,000**
1.06.01.2.08.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-		12 Bulan	**50,397,500**	Dana Alokasi Umum (D A U)		12 Bulan	**60,477,000**
1.06.01.2.08.0002	**Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	**50,397,500**				**60,477,000**

1.06.01.2.09.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-		12 Bulan	**309,833,970**	Dana Alokasi Umum (D A U)		12 Bulan	**371,800,764**
1.06.01.2.09.0001	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Bulan	**25,000,000**	Dana Alokasi Umum (D A U)		12 Bulan	**30,000,000**
1.06.01.2.09.0002	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Bulan	**55,000,000**	Dana Alokasi Umum (D A U)		12 Bulan	**66,000,000**
1.06.01.2.09.0005	**Pemeliharaan Mebel**	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Bulan	**10,000,000**	Dana Alokasi Umum (D A U)		12 Bulan	**12,000,000**
1.06.01.2.09.0006	**Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Bulan	**20,000,000**	Dana Alokasi Umum (D A U)		12 Bulan	**24,000,000**
1.06.01.2.09.0009	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	**199,833,970**				**239,800,764**
21.06.02..	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	-		-	**972,502,800**				**1,167,003,360**

1.06.02.2.02.	**Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	-		10 Orang	**1,959,300**	Dana Alokasi Umum (D A U)		10 Orang	**2,351,160**
1.06.02.2.02.0001	**Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang**	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Kegiatan	**1,959,300**	Dana Alokasi Umum (D A U)		1 Kegiatan	**2,351,160**
1.06.02.2.03.	**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	-		-	**970,543,500**				**1,164,652,200**
1.06.02.2.03.0001	**Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota**	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90 Orang	**13,980,600**	Dana Alokasi Umum (D A U)		90 Orang	**16,776,720**
1.06.02.2.03.0002	**Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota**	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	**325,980,600**				**391,176,720**
1.06.02.2.03.0003	**Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota**	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 lembaga	**2,000,100**	Dana Alokasi Umum (D A U)		4 lembaga	**2,400,120**
1.06.02.2.03.0004	**Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota**	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 orang	**489,225,200**	Dana Alokasi Umum (D A U)		4 orang	**587,070,240**

1.06.02.2.03.0005	**Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)**	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 lembaga	**139,357,000**	Dana Alokasi Umum (D A U)		15 lembaga	**167,228,400**
31.06.03..	**PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**	-		33 kelompok	**6,130,000**	Dana Alokasi Umum (D A U)		33 kelompok	**7,356,000**
1.06.03.2.01.	**Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal**	-		40 klien	**6,130,000**	Dana Alokasi Umum (D A U)		40 klien	**7,356,000**
1.06.03.2.01.0001	**Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal**	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	**6,130,000**				**7,356,000**

41.06.04..	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	-		-	**1,199,830,200**				**1,439,796,240**
1.06.04.2.01.	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	-		10 orang	**422,635,000**	Dana Alokasi Umum (D A U)		10 orang	**507,162,000**
1.06.04.2.01.0001	**Penyediaan Permakanan**	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	**16,140,000**				**19,368,000**
1.06.04.2.01.0002	**Penyediaan Sandang**	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	**7,776,000**				**9,331,200**

1.06.04.2.01.0003	**Penyediaan Alat Bantu**	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 orang	**11,000,200**	Dana Alokasi Umum (D A U)		10 orang	**13,200,240**
1.06.04.2.01.0004	**Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga**	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60 orang	**52,000,000**	Dana Alokasi Umum (D A U)		60 orang	**62,400,000**
1.06.04.2.01.0005	**Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial**	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 orang	**110,421,200**	Dana Alokasi Umum (D A U)		20 orang	**132,505,440**
1.06.04.2.01.0010	**Pemberian Layanan Kedaruratan**	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 orang	**114,487,600**	Dana Alokasi Umum (D A U)		20 orang	**137,385,120**
1.06.04.2.01.0011	**Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga**	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 orang	**35,460,000**	Dana Alokasi Umum (D A U)		50 orang	**42,552,000**

1.06.04.2.01.0012	**Pemberian Layanan Rujukan**	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60 orang	**75,350,000**	Dana Alokasi Umum (D A U)		60 orang	**90,420,000**
1.06.04.2.02.	**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**	-		20 orang	**777,195,200**	Dana Alokasi Umum (D A U)		20 orang	**932,634,240**
1.06.04.2.02.0002	**Pemberian Layanan Kedaruratan**	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 orang	**27,280,000**	Dana Alokasi Umum (D A U)		20 orang	**32,736,000**
1.06.04.2.02.0003	**Penyediaan Permakanan**	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	**10,000,000**				**12,000,000**
1.06.04.2.02.0004	**Penyediaan Sandang**	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 orang	**13,520,000**	Pajak Rokok		30 orang	**16,224,000**

1.06.04.2.02.0006	**Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti**	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 orang	**6,262,500**	Pajak Rokok		10 orang	**7,515,000**
1.06.04.2.02.0007	**Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial**	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 orang	**522,456,700**	Pajak Rokok		25 orang	**626,948,040**
1.06.04.2.02.0008	**Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA**	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 orang	**20,166,000**	Pajak Rokok		30 orang	**24,199,200**
1.06.04.2.02.0013	**Pemberian Layanan Rujukan**	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1100 orang	**144,290,000**	Dana Alokasi Umum (D A U)		1100 orang	**173,148,000**

1.06.04.2.02.0014	**Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota**	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 orang	**33,220,000**	Pajak Rokok		25 orang	**39,864,000**
51.06.05..	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	-		1900 orang	**9,431,189,200**	Pajak Rokok		1900 orang	**11,317,427,040**
1.06.05.2.02.	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	-		-	**9,431,189,200**				**11,317,427,040**
1.06.05.2.02.0001	**Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	**102,337,100**				**122,804,520**
1.06.05.2.02.0002	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	596595 jiwa	**1,447,500,000**	Dana Alokasi Umum (D A U)		596595 jiwa	**1,737,000,000**
1.06.05.2.02.0003	**Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga**	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	63.379 KPM	**7,849,300,800**	Dana Alokasi Umum (D A U)		63.379 KPM	**9,419,160,960**

1.06.05.2.02.0004	**Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat**	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	115037 jiwa	**32,051,300**	Dana Alokasi Umum (D A U)		115037 jiwa	**38,461,560**
61.06.06..	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	-		40 KPM	**275,000,000**	Dana Alokasi Umum (D A U)		40 KPM	**330,000,000**
1.06.06.2.01.	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	-		-	**-**				**-**
1.06.06.2.01.0001	**Penyediaan Makanan**	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	**-**				**-**
1.06.06.2.01.0002	**Penyediaan Sandang**	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 KSB	**-**	Dana Alokasi Umum (D A U)		2 KSB	**-**
1.06.06.2.02.	**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**	-		40 orang	**275,000,000**	Dana Alokasi Umum (D A U)		40 orang	**330,000,000**
1.06.06.2.02.0001	**Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana**	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan	Kab. Kediri, Semua Kecamatan,	-	**-**				**-**

		Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kel/Desa						
1.06.06.2.02.0002	**Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana**	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	**275,000,000**				**330,000,000**
71.06.07..	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	-		1 TMP	**68,997,200**	Dana Alokasi Umum (D A U)		1 TMP	**82,796,640**
1.06.07.2.01.	**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**	-		1 TMP	**68,997,200**	Dana Alokasi Umum (D A U)		1 TMP	**82,796,640**
1.06.07.2.01.0001	**Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 TMP	**-**	Dana Alokasi Umum (D A U)		1 TMP	**-**
1.06.07.2.01.0002	**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	**68,997,200**				**82,796,640**
1.06.07.2.01.0003	**Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	**-**				**-**
.X....	**NON URUSAN**	-	-	-	**2,547,600**				**3,057,120**
.X.XX...	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**	-	-	-	**2,547,600**				**3,057,120**
8.X.XX.01..	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-		-	**2,547,600**				**3,057,120**
.X.XX.01.2.06.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-		-	**2,547,600**				**3,057,120**

.X.XX.01.2.06.0006	**Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan**	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	**2,547,600**				**3,057,120**
.J U M L A H....					**16,654,215,199**				**19,985,058,239**

BAB IV
P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Kediri Tahun 2025, merupakan rencana kerja program/kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran ke depan di Dinas Sosial.

Renja Dinas Sosial disusun sebagai bahan penetapan kebijakan dan penganggaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di bidang sosial, sekaligus merupakan acuan/pedoman pelaksanaan program dan kegiatan sehingga lebih terkoordinasi, terintegrasi dan terkontrol di dalam melaksanakan program/kegiatan tersebut.

Program/kegiatan dibuat berdasarkan perubahan perencanaan program dan kegiatan dari sekretariat dan bidang-bidang di lingkup Dinas Sosial Kabupaten Kediri Tahun 2025 sesuai tugas pokok dan fungsinya, sehingga diharapkan dapat menangani, melayani dan meminimalisir permasalahan sosial yang terjadi, khususnya pada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) atau Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Program rehabilitasi sosial, program perlindungan dan Jaminan sosial, program pemberdayaan sosial serta program penanggulangan kemiskinan; diharapkan dapat menekan permasalahan-permasalahan sosial, dengan memberdayakan dan mengoptimalkan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) serta melibatkan peran serta aktif stakeholder/masyarakat peduli sosial.

Saran dan kritik yang bersifat membangun kami harapkan demi perbaikan penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial ke depan.

Kediri, 2023

Plt. KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN KEDIRI

DYAH SAKTIANA

BUPATI KEDIRI,

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA